



**Balai KIPM
Jakarta II**

Laporan Kinerja T.A 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan pada Balai KIPM Jakarta II selama Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support dan sarannya sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan IV Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 12 Januari 2026

Plt. Kepala Balai KIPM Jakarta II



Dedi Supardi, S.St.Pi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
1.1 Sasaran	7
1.2 Indikator dan Target Kinerja	8
1.3 Pengukuran Kinerja	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	11
3.2 Analisis dan Evaluasi.....	14
3.3 Realisasi Anggaran	33
IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Rekomendasi.....	34
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi	34

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Jakarta IITA 2025	
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai KIPM Jakarta II TW IV Tahun 2025	
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 TW IV Tahun 2025	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW IV Tahun 2025	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW IV Tahun 2025	17
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW IV Tahun 2025	18
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW IV Tahun 2025	19
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW IV Tahun 2025	20
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW IV Tahun 2025	21
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 TW IV Tahun 2025	21
Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 TW IV Tahun 2025	23
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 TW IV Tahun 2025	28
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 TW IV Tahun 2025	29
Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 TW IV Tahun 2025	29
Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 TW IV Tahun 2025	30
Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 TW IV Tahun 2025	30
Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 TW IV Tahun 2025	30
Tabel 20 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan TW IV Tahun 2025	38
Tabel 21 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja TW IV Tahun 2025	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah 111,63% Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Jakarta II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II mempunyai Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan.

Balai KIPM Jakarta II telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan IV Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut : ***Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan.***

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan IV adalah 70% dan realisasi 100% sehingga capaian 120%;
- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan IV adalah 70% dan realisasi 97,50%, dengan capaiannya 120%;
- Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan IV 1% sudah tercapai 1% sehingga capaiannya 100%
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II, target triwulan IV 99% sudah tercapai 100% sehingga capaiannya 101,01 %.

Sasaran strategis 2 yaitu terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan yang sesuai standar.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai KIPM Jakarta II, dari target 75%, realisasi 84,32% sehingga capaiannya 112,43%;
- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 75%, realisasi 89,75% sehingga capaiannya 119,67%.

Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 92%, realisasi 90,08%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 97,91%;
- Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 71,50%, realisasi 100%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 120%;
- Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 100%;
- Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 82%, realisasi 83,22%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 101,49%;
- Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 86%, realisasi 86,25%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 100,29%;
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 85%, realisasi 100%% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 117,65%;
- Persentase Rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 76%, realisasi 100% sehingga capaian nilai kinerja sebesar 120%;
- Presentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, dari target 70%, realisasi 75,14%, sehingga capaian nilai kinerja sebesar 107,34%;
- Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 3,36%, realisasi 96,15% sehingga capaian nilai kinerja sebesar 120%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Balai KIPM Jakarta II Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Triwulan IV Tahun 2025 dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk

dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Balai KIPM Jakarta II dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Jakarta II pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Balai KIPM Jakarta II dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM Jakarta II) merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Jakarta II dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Jakarta II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan IV tahun 2025. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Jakarta II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keamanan Hasil Perikanan, sebagai penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai KIPM Jakarta II menyelenggarakan fungsi:

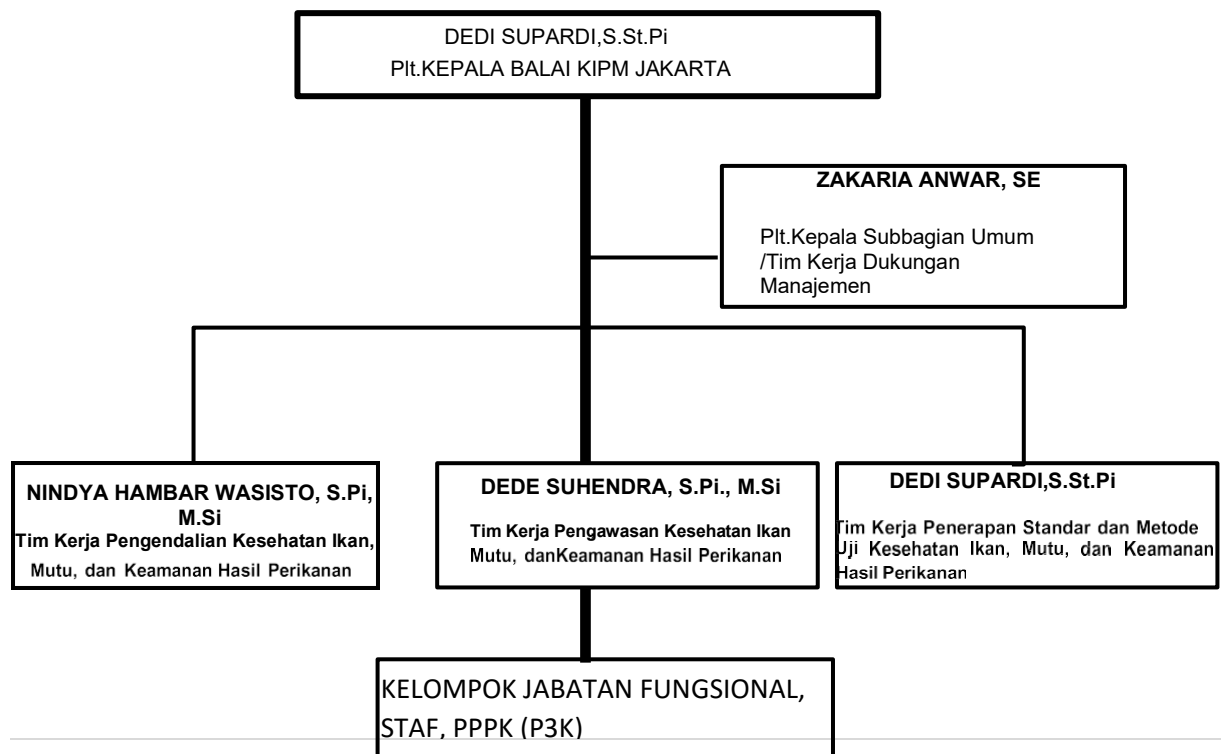
- A. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan; merupakan mempunyai tugas sebagai Quality Assurance;
- B. mengatur pelaksanaan system penjaminan mutu ditingkat lokal diseluruh negara.
- C. Memaparkan pada tingkat hulu, Lembaganya melaksanakan sertifikasi seperti Cara penanganan yang baik (good handling practices), Cara budidaya ikan yang baik (good aquaculture practices), Cara produksi obat ikan yang baik (good fish drugs production practices), Cara produksi pakan ikan yang baik (good fish feed production practices), Cara penanganan yang baik di atas kapal penangkap ikan (good handling practices on board fishing ports) ;
- D. Sementara pada tingkat hilir, BPPMHKP melaksanakan sertifikat cara pembuatan yang baik (good manufacturing practices), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan pengelolaan distribusi ikan yang baik (good fish distribution management practices).

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 2 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda (2 orang ketua Pokja)

1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 3 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 1 orang Analis Mutu Hasil Perikanan, 2 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 3 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 11 orang PJLP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 3 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda (2 orang ketua Pokja), 1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 4 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 2 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 2 orang CPNS, 3 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPPK) dan 11 orang PJLP.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Jakarta II



1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai KIPM Jakarta II disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai KIPM Jakarta II adalah sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

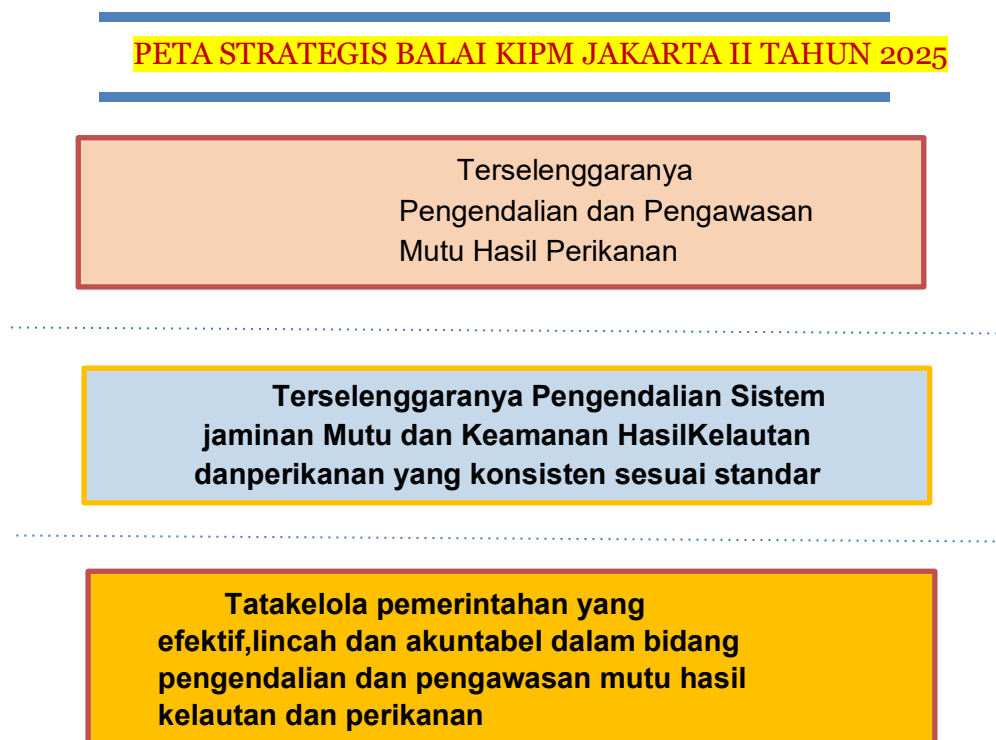
- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Balai KIPM Jakarta II tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 **Peta Strategi BALAI KIPM JAKARTA II tahun 2025**

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II mempunyai indikator sebanyak 15 Indikator sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				2025	TW IV
Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkupUPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70
		3	Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Lingkup Balai KIPM Jakarta II (lokasi)	1	1
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (persen)	99	99
Kegiatan 2. Manajemen Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya a Pengendalian Sistem Jaminan mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan yang sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Lingkup di Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75	75

		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi Lingkup di Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75	75
SK3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	92	92
		8	Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	71,50	71,50
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	100	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	82	82
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	86	86
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	85	85
		13	Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	76	76
		14	Persentase pemenuhan Dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70
		15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	3,36	3,36

1.4 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah: Angka maksimum adalah 120;

Angka minimum adalah 0;

Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Polarisasi Minimize




Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

1. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

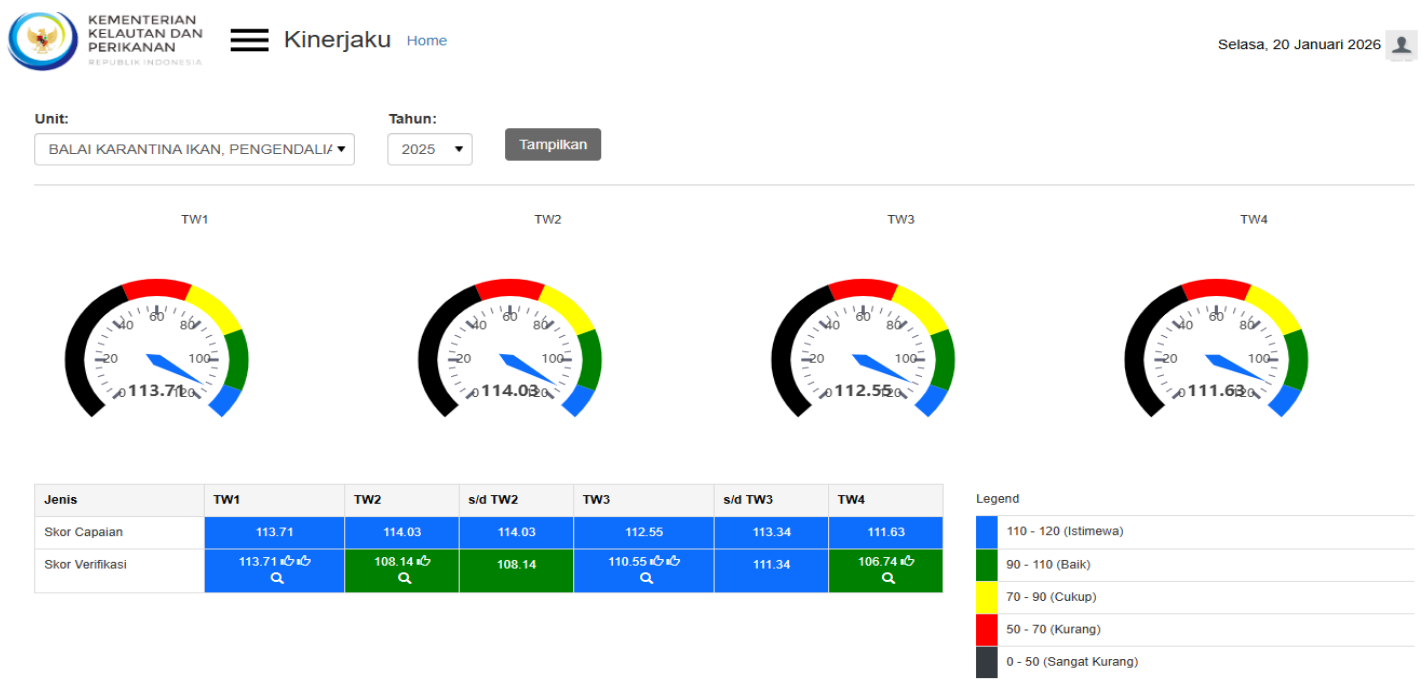
	$100 \leq X \leq 120$ (memenuhi ekspektasi)
	$80 \leq X \leq 100$ (belum memenuhi ekspektasi)
	$X \leq 100$ (Tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111,63% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN IV 2025		
				TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	100	120
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	97,50	120
		3	Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (lokasi)	1	1	100
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (persen)	99	100	101,01

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN IV 2025		
				TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian Sistem jaminan mutudan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75	84,32	112,43
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75	89,75	119,67
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP						
SK3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	92	90,08	97,91
		8	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	71,50	100	120
		9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	100	100	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	82	83,22	101,49
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	86	86,25	100,29
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	85	100	117,65
		13	Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan yang pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	76	100	120
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	75,14	107,34
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	3,36	96,15	120

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan lingkup Balai KIPM Jakarta II.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya;

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: Standar Nasional Indonesia (SNI) Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di Balai KIPM Jakarta II, pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator ini mempunyai target 70% dan realisasi adalah 100% dengan persentase capaian sebesar 120%

Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan,lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	83,33	100	70%	100	120%	70%	100%

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di BKIPM Jakarta II, dan pada Triwulan IV Tahun 2025 ditargetkan 70%, realisasi adalah 93% dengan capaian persentase sebesar 120%

Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II	72,04%	97,50%	70%	97,50%	120%	70%	93%

IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic; Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di BKIPM Jakarta II, dan Pada Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan 1 lokasi, realisasi adalah 1 lokasi dengan capaian persentase sebesar 100%.

Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup	-	100%	1	1	100%	-	-%

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor); Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional; Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. pada triwulan IV Tahun 2025 mempunyai target adalah 99%, realisasi sebesar 100% dengan persentase 101,01%.

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II	100%	100%	99%	100%	101,01%	-	-

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Sasaran Strategisi 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar lingkup Balai KIPM Jakarta II.

IK5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar;

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium *official control*;

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 indicator ini mempunyai target adalah 75 realisasi capaian kinerja sebesar 84,32 dengan persentase sebesar 112,43%. Dibandingkan dengan capaian kinerja

Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024- 2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020- 2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II	83,10	84,32	75	84,32	112,43%	-	-

IK6. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 indicator ini mempunyai target adalah 75 realisasi capaian kinerja sebesar 89,75 dengan persentase sebesar 119,67%

Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Perse n
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	89,75	75	89,75	119,67%	-	-

Kegiatan Sekretariat BKIPM

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni **Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Lingkup Balai KIPM Jakarta II.**

Sasaran Strategis 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM.

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan ingkup Balai KIPM Jakarta II menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai KIPM Jakarta II.

IK7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (I K P A) Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

Indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiscal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Cara Perhitungan rumus sebagai berikut :

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Indikator ini mempunyai target pada triwulan IV atau semester II tahun 2025 adalah 92 realisasi capaian sebesar 90,08 dengan persentase 97,91%, dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2024 meningkat karena capaian output, penyerapan anggaran memenuhi kualitas hasil pelaksanaan angaran Balai KIPM Jakarta II.

Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	91,49	90,08	92	90,08	97,91	-	-

IK8. Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Balai KIPM Jakarta II

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Pada triwulan IV IKU ini mempunyai target adalah 71,50 dan realisasi anggaran adalah 100 dengan persentase sebesar 120%, dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2024 meningkat disebabkan nilai efektifitas dan efisiensi capaian disetiap indikator mempunyai bobot kinerja anggaran pada Balai KIPM Jakarta II.

Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Indikator kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	91,49%	100	71,50	100	120%	-	-

IK9. Persentase Penyelesaian Temuan L H P BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Cara Peritungan rumus sebagai berikut :

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{100\% \text{ Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times$$

Pada triwulan IV tahun 2025 IKU ini mempunyai target 100%, capaian anggaran adalah 100% dengan persentase sebesar 100%.

Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase Penyelesaian Temuan L H P BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II	100	100	100	100	100%	-	-

IK.10 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- Kualifikasi;
- Kompetensi;
- Kinerja; dan
- Disiplin.

dicapai, meliputi :

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);

e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat;
f. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi (**)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau

nonklasikal;

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d dibawah	1

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai Disiplin
• 0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuain dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
- b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
- c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.
- b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pada Tahun 2025 IKU ini pada triwulan IV atau semester II dalam Perjanjian kinerja terdapat revisi target semula 86 menjadi 82, capaian anggaran adalah 83,22 dengan persentase sebesar 101,48%. Dibandingkan dengan semester II tahun 2024 menurun realisasi anggaran disebabkan penilaian bobot kompetensi mempengaruhi nilai kinerja pegawai ASN;

Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Indeks Profesionalitas ASN	87,88	83,22	82	83,22	101,48%	-	-

IK11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri Balai KIPM Jakarta II dihitung berdasarkan Permen

PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

FORMULASI PERHITUNGAN

- Nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri [Sekretariat Es.1](#)
- atas implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 2)
- Kategori nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
	>30 – 50	Kurang
DD	0 – 30	Sangat Kurang

Pada Tahun 2025 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 86, namun pada triwulan IV Tahun 2025 tidak ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra 2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	82,15	86,25	86	86,25	100,29%	-	-

IK12. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran. Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas,

Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra 2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	100	85	85	100	117,65%		

IK13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT Balai KIPM Jakarta II (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Cara Perhitungan Rumus Sebagai Berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =
$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pengadaan barang/jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada triwulan IV IKU ini mempunyai target 76% dan realisasi adalah 100% dengan persentase 120%.

Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase rencana umum pengadaa PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT Bala KIPM Jakarta II (%)	84,34	100	76	100	120%		

IK14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Cara Pengukuran rumus sebagai berikut :

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, meliputi

- Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada triwulan IV iku ini mempunyai target 70, realisasi anggaran adalah 75,14 dengan persentase sebesar 107,34%;

Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 pada Triwulan VI Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	-	75,14	70	75,14	107,34%	-	-

IK15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan

Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Cara Perhitungan Rumus Sebagai Berikut :

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$

Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25.

Pada triwulan IV IKU ini terdapat revisi target perjanjian kinerja tahun 2025 semula 88 menjadi 3,36. Dan realisasi adalah 96,15 dengan persentase 120%, dibandingkan dengan TW IV tahun 2024 lebih meningkat realisasi capaian kinerja hal ini disebabkan adanya nilai total hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	3,71	96,15	3,36	96,15	120,00%		

1.1 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Jakarta II pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. **8.751.993.000** dan pada triwulan IV tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. **7,956,986,508** atau sebesar **90,92 %** Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jakarta II TW IV T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan IV Tahun 2025

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN(Rp)	%
1	7010	Manajemen Mutu	610,420,000	586,290,920	96.05
2	3989	Pengendalian Mutu	220,240,000	40,102,000	18,21
4	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP	7,921,333,000	7,330,593,588	92,54
		TOTAL	8,751,993,000	7,956,986,508	90,92

Tabel 21. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Triwulan IV Tahun 2025

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3,898,420,000	3,520,297,898	(90.30%)
2	Belanja Barang	4,853,573,000	4,436,688,610	(91.41%)
3	Belanja Modal	-	-	
	TOTAL	8,751,993,000	7,956,986,508	90.92%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Balai KIPM Jakarta II pada triwulan IV tahun 2025, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan IV sebesar 111,63%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 15 Indikator Kinerja sudah tercapai sesuai target dan realisasi pada triwulan IV Balai KIPM Jakarta II.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Tahun 2024, yaitu :

Perjanjian Kinerja pimpinan sudah disesuaikan dengan adanya perubahan organisasi dari BKIPM menjadi BPPMHKP, dimana fungsi karantina ikan sudah tidak tercantum lagi dalam Perjanjian Kinerja.

LAMPIRAN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) SALAI KIPM Jakarta II TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Penguasaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
 Nama IKU 1 : Peningkatan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPTI Balai KIPM Jakarta II.

IKU	TAHUN							Capaian th. 2025	Target th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Realisasi	97,92	91,87	94,81	100	100	100	121,1	121,1	-
% Capaian	139,88	130,95	135,41	142,85	142,85	142,85	173	173	-

Catatan :
 Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4.
 Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian diakhirtahun 2025.

Isu utama dan implikasi

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIS,CPIS,CPPIIS,CPDIB, CODIB dan perikanan tangkap meliputi CPIS di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di atas Kapal Perikanan
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB).

Triwulan IV tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II menerima 28 permohonan dan telah melaksanakan 28

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal terdiri dari:

1. KM. REJEKI MELIMPAH - I
2. KM. Wish Me Luck - I
3. KM. JAWA SENTOSA
4. KM. SELALU MELIMPAH
5. KM. TERANG LAUT
6. KM. MITRA PRIMA 18
7. KM GISELLE
8. KM Marcel Jaya 29
9. KM. Putra Sukses Mandiri 5
10. KM. JIMMY WUAYA 04
11. KM. Tahta Samudra
12. KM.Naili - II
13. KM. PUTRA SUKSES MANDIRI-5
14. KM. CAHAYA TRIMARINE
15. KM. Hasil Melimpah 9
16. KM. Jaya Utama 7
17. KM. Kilat Maju Jaya 28
18. KM. BINTANG SAMPURNA JAYA 5
19. KM. Kilat Maju Jaya 12
20. KM. PUTRA SUKSES MANDIRI 2
21. KM. Bintang Rosoki 5
22. KM. PUTRA SUKSES MANDIRI 1
23. KM. Bintang Sempurna A
24. KM. JIMMY WUAYA - 7
25. KM. CHARLIE TUNA WUAYA - 3
26. KM. CHARLIE TUNA WUAYA - 4
27. KM. Hasil Melimpah 21
28. KM. SARUNA JAYA SEJAHTERA

Triwulan IV tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II menerima 15 permohonan dan telah melaksanakan 15

Sertifikat dengan komoditi lele dan nila. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) terdiri dari:

1. EDI SUSANTO (Perum Bumi Kota Baru Indah Blok A.3/3, Desa Pangulah Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang)
2. NOVAN WARDANI (Dusun Karangsalam, RT.005/RW.005 Desa Pucung, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang)
3. UHO SUMORI (Dusun Karangsalam RT.002/RW.006 Desa Pucung, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang)
4. KOSIM NURSEHA (Kopo Timur RT.005/RW.004 Desa Mukti Jaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang)
5. BASORI (Dusun I RT.001/RW.001 Desa Sumurgede, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang)
6. ANDI SUGIANTO (Kp. Sukasari, Desa Sarimulya, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang)
7. NURDIN FIRMANSAH (Dusun Selam, Desa Pasirkamuning, Kec. Telagasari, Kab. Karawang)

8. DIANAWATI (Dusun OS Pasirala, Desa Pasirjengkol, Kcc. Majaleya, Kab. Karawang)
9. MAMAN SUDI HARTONO (Dusun Rawadukuh, Desa Pasirtanjung, Kcc. Lomahabang, Kab. Karawang)
10. ERIK APRIANTO SINAGA (Kp. Ceru Serat, Dusun Ceru Serat, Desa Pangulah Utara, Kcc. Kotabaru, Kab. Karawang)
11. USUP SUPARMAN (Dusun Rawadukuh, Desa Pasirtanjung, Kcc. Lomahabang, Kab. Karawang)
12. M. JULIAN ALFATAH (Kp. Babakan Jati, Desa Cikampok Timur, Kcc. Cikampok, Kab. Karawang)
13. ARI MANDIRI (Dusun Negeri, Desa Seder, Kcc. Cibuya, Kab. Karawang)
14. AHMAD JAENI DAHLAN (Kp. CISELANG RT.002 / RW.004, Desa Karangjaya, Kcc. Tirtamulya, Kab. Karawang)
15. UJANG MULYANA (Dusun Mengga Besar II, Desa Walehar, Kcc. Klar, Kab. Karawang)

Triwulan IV tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II menerima 13 permohonan dan telah memfasilitasi 13 Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIS) terdiri dari:

1. Apriana Ramdani (Nila)
2. Adul (Lolo)
3. Maledison (Nila Merah)
4. Rendi Kurniawan (Lolo)
5. Hasnuddin (Lolo)
6. Rusli Hasanudin Tambunan (Lolo)
7. Abdul Majid (Lolo)
8. Pt. Riang Agro Lestari (Udang Vaname)
9. Hasanah (Lolo)
10. Abdul Rosyid (Lolo)
11. Fachrizal Noviana Taufik (Nila)
12. Abdur Rachman Ayyali (Nila)
13. Masta (Udang Vaname)

Triwulan IV tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II belum menerima permohonan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIS), sehingga pada triwulan ini belum melakukan sertifikasi terhadap ruang lingkup tersebut.

Triwulan IV tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II belum menerima permohonan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIS), sehingga pada triwulan ini belum melakukan sertifikasi terhadap ruang lingkup tersebut.

Triwulan IV tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II menerima 1 permohonan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), dan telah memfasilitasi 1 permohonan sertifikat tersebut atas nama PT CHEIL JEDANG BIO INDONESIA.

Capaian itu ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$SX = \frac{A+B+C+D}{4} \times 100\%$$

SX = Persentase hasil kolektif dan penilaian sektor produksi primer yang memenuhi standar Mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIS

B = Persentase Unit menerapkan CPIS

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIS

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIS

<p>E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPDIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan</p> <p>F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIS Kapal an = Jumlah dari unsur berbentuk (8) (+)</p>
<p>Akar Masalah</p> <p>tidak tersedia anggaran guna menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan.</p>
<p>Tindakan yang telah dilaksanakan</p> <p>UPT Balai KIPM Jakarta II telah mengusulkan kepada pusat-pusat terkait, pengurusan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Tusi</p>

Rekomendasi rencana aksi	PemanggungJawab	Periode
Melakukan permohonan kepada Pusat agar dapat dialokasikan anggaran perjalanan guna mendukung pelaksanaan sertifikasi.	Ketua Tim Kerja Produktif Primer Balai KIPM Jakarta II.	TW. 4 tahun 2025

Sertifikat CPB Kapal Triwulan IV



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGELOLAAN DAN PENGARAHAN MUTU ISAL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Ministry of Marine Affairs and Fisheries
 Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PERANGKARAN DAN YANG BAK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPB - K - 31 - 20265

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perikanan dan perikanan
 based on Ministerial Regulation No. 10 of 2021 Regarding Activity Standards for Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perikanan dan perikanan
 Ministerial Regulation No. 10 of 2021 Regarding Activity Standards for Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menyatakan bahwa
 to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: JIMMY BUAYA 94
Alamat Address	: Tranet Timur No. 26, PPSB Muara Baru, Kel. Pengerrangan, Kel. Pengerrangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 97 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Perikanan Fishing vessel
Tanggal Isapaksi Inspection date	: 08 November 2025 08 November 2025
Jenis Produk Commodity	: Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cangkaland Beku Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod
Certifikasi Grade	: B

Unggahan telah memenuhi persyaratan Cara Perangangan dan yang BAK
 Uploaded file has fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dibuatkan di Issued in	Jakarta
Valid hingga Valid until	21 November 2026 21 November 2026
Valid until Valid until	21 November 2027 21 November 2027

Kapala BPTM 907
 Director General of MPQAA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGEVALUASI DAN PENGARAHAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENYIMPANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPB - K - 31 - 20226

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perikanan, Rencana Bisnis Usaha Sektor Seludup Ikan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: TAHITA SAMUDRA
Alamat Address	: Jl. Pluit Timur Blok LNo. 24, Dora Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Unitas Kapal Size of fishing vessel	: 188 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Perikanan Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 04 November 2022 04 November 2022
Jenis Produk Commodity	: Tuna Beku, Ikan Paus Beku Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish
Dibuat di Place	: 6

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penyimpanan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled its Good Handling Practice requirements

Disetujui di Issued at	: Jakarta
Tanggal Date	: 24 November 2022 24 November 2022
Surat ini berlaku Valid until	: 04 November 2027 24 November 2027

Kepala BPPMOP
Director General of MPQAA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPB - K - 31 - 251213

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perikanan Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: NAILI II
Alamat Address	: Pelabuhan Samudera Nizam Zachman Transid, Shed No. 10 B Dermaga Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Desa/Kelurahan Penjarangan, Kec. Penjarangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 115 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 06 November 2025 06 November 2025
Jenis Produk Commodity	: Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish
Pemeriksaan Grade	: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in
Pada tanggal : 24 November 2025
Date
Berlaku sampai : 24 November 2027
Valid until

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

BERTIFKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPB - K - 31 - 251200

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perikanan Berusaha
Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries
Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the
Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menyatakan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: PUTRA SUKSES MANDIRI 5
Alamat Address	: Infiniti Office, Ruko Permata Regency Blok D Nomor 37, Jalan Haji Kelik, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 195 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkai Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 07 November 2025
Jenis Produk Commodity	: Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish
Pertingkatan Grade	: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan Yang Baik
is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 20 November 2025
Berlaku sampai Valid until	: 20 November 2027

Kepala BPPM-IKP
Director General of MFQA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPMB - K - 31 - 251219

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kebersihan, Keamanan, dan Kualitas Produk pada Penyelenggaraan Perikanan Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: CAHAYA TRIMARINE
Alamat Address	: Jl. Muara Baru Ujung Blok O Kev 1-2, Desa Kelurahan Perjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 148 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 06 November 2025 06 November 2025
Jenis Produk Commodity	: Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish
Pemadinkatan Grade	: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in : Jakarta
Pada tanggal : 24 November 2025
Date : 24 November 2025
Berlaku sampai : 24 November 2027
Valid until : 24 November 2027

Kepala BPPM-KP
Director General of MFQAA

Ishartini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 270225003930100010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : AHMAD JABRI DAHLAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2702250039301 |
| 3. Alamat Kantor | : KP. CISELANG RT/RW 02/04 DESA KARANGJAYA KEC. TIRTAMULYA
KODE POS 41372, Desa/Kelurahan Karangjaya, Kec. Tirtamulya, Kab.
Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03229 - Pembenihan Ikan Air Tawar |
| 6. Lokasi Usaha | : Desa Pengulu Utara Rt.001/Rw.001 Caru Barat Desa/Kelurahan
Pengulu Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41374 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan tanggal: 20 Oktober 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditak tanggal: 20 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam format PDF yang dapat diakses secara online melalui portal layanan publik.
2. Dokumen ini terdapat tanda tangan elektronik yang dapat diverifikasi melalui portal layanan publik.
3. Dokumen ini terdapat tanda tangan elektronik yang dapat diverifikasi melalui portal layanan publik.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 270225003930100010002**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | ⌋ ID-CPIB-T-32-250132 |
| 2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan | ⌋ Desa Panguloh Utara Rt.001 Rw.001 Caru Barat |
| 3. Komoditas | ⌋ Benih Ikan Nila |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | ⌋ 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | ⌋ BAIK |

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuat berdasarkan DSD berdasarkan data dan Fakta Usaha. Lampiran dalam dokumen DSD yang terlampir dengan judul Fakta Usaha.
2. Dokumen ini dapat diakses di akun resmi atau di akun resmi yang terlampir dengan judul Fakta Usaha.
3. Dokumen ini tidak diterbitkan secara resmi oleh instansi yang menerbitkan dan tidak memiliki nilai hukum.
4. Dokumen ini tidak diterbitkan secara resmi oleh instansi yang menerbitkan dan tidak memiliki nilai hukum.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBIHIAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 090422001356900070002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Pembihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT MINAMAS SEDARI MANDIRI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0904220013569
3. Alamat Kantor	: DUSUN NEGLASARI, Desa/Kelurahan Seder, Kec. Cibauys, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41356
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03226 - Pembihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha	: Dusun Neglasari Rt.002 Rw.004 Desa/Kelurahan Seder, Kec. Cibauys, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41356

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan peralatan unit pembihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan tanggal: 20 Oktober 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 090422001356900070002**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	: ID-CPB-T-32-250131
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	: Dusun Naglasari Rt.002 Rw.004
3. Komoditas	: Benih Ikan Nila
4. Masa Berlaku Sertifikat	: 4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	: BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 110524001566800020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini.

1. Nama Pelaku Usaha	: MUHAMMAD JULIAN ALFATH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1105240015668
3. Alamat Kantor	: KP. BABAKAN JATI, Desa/Kelurahan Cikampok Timur, Kec. Cikampok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Suku Lapangan Usaha Indonesia (KSLU)	: 55226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha	: Kp. Babakan Jati RT 03/ RW 04 Desa/Kelurahan Cikampok Timur, Kec. Cikampok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41374

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Dibbitkan tanggal: 20 Oktober 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Nitkisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 20 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Informasi Data dan Risiko (SIDR) dan terdapat dalam Sistem Informasi Data dan Risiko (SIDR) yang dapat diakses secara online.
2. Dokumen ini terdapat dalam Sistem Informasi Data dan Risiko (SIDR) dan terdapat dalam Sistem Informasi Data dan Risiko (SIDR) yang dapat diakses secara online.
3. Dokumen ini terdapat dalam Sistem Informasi Data dan Risiko (SIDR) dan terdapat dalam Sistem Informasi Data dan Risiko (SIDR) yang dapat diakses secara online.
4. Dokumen ini terdapat dalam Sistem Informasi Data dan Risiko (SIDR) dan terdapat dalam Sistem Informasi Data dan Risiko (SIDR) yang dapat diakses secara online.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 110524001566800020001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CPB-T-33-250130 |
| 2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan | : Kp. Babakan Jati RT 03/ RW 04 |
| 3. Komoditas | : Benih Ikan Nila |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : BAAK |

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuat oleh sistem (OTS) berdasarkan data dan Fakta Usaha, terapan dalam bentuk OTS, yang sesuai dengan standar Perizinan Berusaha.
2. Dokumen ini tidak memiliki nilai hukum dan tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen fisik.
3. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain, kecuali untuk tujuan yang ditetapkan oleh sistem (OTS).
4. Data terapan Perizinan Berusaha akan diperbarui secara otomatis oleh sistem (OTS) menggunakan data terbaru.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 110925009978300000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pemaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pemaku Usaha	: ABDUR RACHMAN ASYALI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1109250099783
3. Alamat Kantor	: PERUM SARASWATI I BLOK A 57, Desa/Kelurahan Cikampek Selatan, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03221 - Pembesaran ikan Air Tawar Di Kolam
6. Lokasi Usaha	: Perum Saraswati Blok A, 57 Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kab. Karawang Desa/Kelurahan Cikampek Selatan, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41373

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan pelatikan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pemaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 29 Oktober 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal 29 Oktober 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 110925009978300000001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	: ID-CBIB-T-32-250430
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	: Perum Santawati Blok A, 57 Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kab. Karawang
3. Komoditas	: Nila (<i>Oreochromis sp.</i>)
4. Masa Berlaku Sertifikat	: 4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	: Sangat Baik

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam CD/D berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga akan terdapat CD/D yang sesuai dengan hasil Penerimaan Usaha.
2. Dokumen ini dapat diakses di alamat https://www.kemendiknas.go.id/ atau melalui aplikasi yang terdapat pada CD/D.
3. Dokumen ini tidak dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum, namun dapat diakses melalui aplikasi yang terdapat pada CD/D.
4. Dokumen ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 220722000636700010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Fochrizal Noviana Taufik |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2207220006367 |
| 3. Alamat Kantor | : Perum Suksewuri Blok C-8, Desa/Kelurahan Setimulya, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) | : 03221 - Pembenihan Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 6. Lokasi Usaha | : Kampung Bukitani, Desa/Kelurahan Pengulu Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41374 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dibagikan tanggal: 29 Oktober 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan online (OS) berdasarkan data dari Pelaku Usaha, termasuk dokumen online (OS), yang terdapat dalam proses.
2. Dalam hal terdapat kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan secepatnya.
3. Dokumen ini tidak akan dianggap resmi jika tidak menggunakan profil atau dokumen yang diterbitkan oleh BPSN.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 220722000636700010001

Lampiran berikut memuat data teknis: **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	: ID-CBIB-T-32-250429
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	: Kampung Sukatani
3. Komoditas	: Nila (<i>Oreochromis sp.</i>)
4. Masa Berlaku Sertifikat	: 4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	: Baik

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Elektronik dan dapat diakses secara online oleh publik.
2. Dokumen ini tidak memiliki nilai hukum jika dicetak atau diubah tanpa persetujuan resmi.
3. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Balai Sertifikasi Elektronik.
4. Dokumen ini merupakan dokumen resmi dan tidak dapat diubah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 090725003739600010001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: ABDUL ROSYID
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0907250037396
3. Alamat Kantor	: GRIYA PESONA ASRI D501, DesaKelurahan Cibalongari, Kec. Klati, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
6. Lokasi Usaha	: GRIYA PESONA ASRI D501 DesaKelurahan Cibalongari, Kec. Klati, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41371

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 November 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 November 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 090725003739600010001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	: ID-CBIB-T-32-250488
2. Alamat Tempel Budi Daya Ikan	: GRHA PESONA ASRI DS/31
3. Komoditas	: Lili (<i>Clarias sp.</i>)
4. Masa Berlaku Sertifikat	: 4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	: Cukup

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 026201101245800010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MASTA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0052011012458 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN MEKAR JAYA, Desa/Kelurahan Tanjungpekik, Kec. Pakelajaya,
Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: _____ |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau |
| 6. Lokasi Usaha | : Dusun Mekarjaya RT.001 / RW.010 Desa/Kelurahan Tanjungpekik, Kec.
Pakelajaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41355 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Diberikan tanggal: 06 November 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 November 2025

1. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Pemerintah Republik Indonesia, menggunakan sistem elektronik (SES), yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.
2. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Pemerintah Republik Indonesia, menggunakan sistem elektronik (SES), yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.
3. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Pemerintah Republik Indonesia, menggunakan sistem elektronik (SES), yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.
4. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Pemerintah Republik Indonesia, menggunakan sistem elektronik (SES), yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.



Belai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 026201101245800010001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CBIB-P-32-250454 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : Dusun Mekorjaya RT.001 / RW.010 |
| 3. Komoditas | : Udang vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 026201101245800010001**

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pemaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pemaku Usaha	: MASTA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0262011012458
3. Alamat Kantor	: DUSUN MEKAR JAYA, DesaKelurahan Tanjungpek, Kec. Pekajaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau
6. Lokasi Usaha	: Dusun Mekarjaya RT.001 / RW.010 DesaKelurahan Tanjungpek, Kec. Pekajaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41355

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian dari terpisahkan dari dokumen ini. Pemaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 November 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 November 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 026201101245800010001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CBIB-P-32-250454 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : Dusun Mekarjaya RT.001 / RW.010 |
| 3. Komoditas | : Udang vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen diterbitkan dalam CD yang tertera data dan Foto/Usaha terlampir dalam buku CD yang terlampir sebagai data teknis usaha.
2. Dokumen ini diterbitkan di lingkungan dan harus dipertahankan sebagaimana bentuknya.
3. Dokumen ini harus dipertahankan secara elektronik terintegrasi dengan sistem informasi yang terdapat di BPPK BPPK.
4. Dokumen ini harus dipertahankan secara elektronik terintegrasi dengan sistem informasi yang terdapat di BPPK BPPK.



Sertifikat CDOIB Triwulan 4



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK
(CDOIB)
PB UMKU: 121700071076900130001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: PT CHEIL JEDANG BIO INDONESIA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1217000793799
Alamat Kantor	: GEDUNG MENARA BPIANGSOTOK LANTAI 21, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 38, Desa Yakurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Maspalen, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12710
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Asing (PMA)
Nomor Telepon	: 02182995000
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 4644 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan
Lokasi Usaha	: Cahilac Smart Logistic - Warehouse 02, Greenland International Industrial Center (GHC) Blok BD No. 1, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Nomor Induk Berusaha
2. Sederhana struktur gedung dan tata letak (layout) ruangan
3. Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan
4. Formulir data dan pernyataan CDOIB yang telah diisi
5. Personil pernah mendapatkan pelatihan CDOIB atau surat pernyataan memahami prinsip-prinsip CDOIB
6. Untuk distributor memiliki tenaga profesional

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian dari terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibagikan di Jakarta, tanggal 10 Desember 2025.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LAMPIRAN PB-UMKU: 121700071076900130001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CDOIB-32-250014 |
| 2. Kategori | : P1 (Pengawasan 1 kali dalam 4 tahun) |
| 3. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |

Fasilitas Distribusi Obat Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**

JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320
TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634
LAMAR www.kkp.go.id SUREL kkpmjakarta2@kkp.go.id

SURAT PENGANTAR

NOMOR B.45/BKIPM.JKT.II/KP.440/I/2026

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	IKU.1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025.	1 (satu) berkas.	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Januari 2026

Penanggung Jawab Laporan



Nindy Hambar Wasisto, S.Pi., M.Si

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 2 :	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

T/R	TAHUN							Capaian	Target
	Q1	Q2	3m.I	Q3	Q4	6m.II	Tahunan	Th. 2025	Th. 2025
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	99,5 %	98,5%	99%	99%	97,5%	86,25	87,125	87,125	-
% Capaian	142,14%	140,71%	141,42%	132,85%	139,28%	138,07%	138,75%	138,75%	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

6m I = Capaian Q1 + Capaian Q2

6m 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi	
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas Kompeten. • Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. • Sektor produksi Pasca Panen menuju kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. • Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Indonesia (SNI); 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius); 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. • Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis bahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau dikolah. 	

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen :

- A. Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
 - B. Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- a. Persentase penerbitan HACCP ruang lingkup produk pada triwulan IV adalah 100 sertifikat, dan permohonan pengajuan skp sebanyak 306 dari 59 UPI dan tidak ada penolakan, sudah terealisasi 100% skp yang diterbitkan.
- b. Persentase Penerbitan HACCP ruang lingkup produk dan persentase SKP yang diterbitkan pada triwulan IV sudah terealisasi sebesar 97,5% dengan capaian persentase adalah 139,26%.
- c. Capaian Iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)²

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\% = \frac{100+100}{2} \times 100\% = 97,5 \%$$

Akar Masalah
-
Tindakan yang telah dilaksanakan
-

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan	Tw.4 Tahun 2025

HONEST
HACCP Online System

Pengajuan | Master | Dokumentasi | **Rekapitulasi**

Sertifikasi

-Alamat: | -Produk: | -Tgl Terbit: OKTOBER 2020 - DESEMBER 2020

[Presat] [MPT] [Cradle] [Product] [Type Produk] [Jenis Usahat] [Gala Usahat]

[Status Sertifikasi] [Lama Sertifikasi] [Status MPT] [Status Produk] [Jenis] [Nagara Importir] [MRA] [Jumlah] [Tampilkan]

12 Data | 11 Error | Jumlah : MPT = 25 Unit | Sertifikasi = 100 Dokumen

[illegible]

LABEL DAFTAR UTI SIKIP II JOMBANG IV 2023

No	Tanggal Inspeksi	Tanggal	Nama UPI/UPRL	Alamat	Jenis Produk	Status
1	1 Oktober 2025	2 Oktober 2025	(CV) PRIMA TEGUH (skala kecil)	Komplek Duta Harapan Indah Blok QQ No.4 RT 008 RW 002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Sirip Hiu Kering, Kulit Hiu Kering, Tulang Hiu Kering 2. Sirip Pari Kering, Kulit Pari Kering, Tulang Pari Kering 3. Teripang Kering Gelembung Ikan Kering	Perpanjangan
2	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025	PT. SAFARI SETIA INDONESIA (skala menengah)	Pelabuhan Nizam Zachman, (room 01) Jl. Tuna IV No.77, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Daging Tetelan Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Cumi-cumi Beku 5. Salmon Beku, Trout Beku	Baru
3	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025	PT. ARUNIKA SWARA NUSANTARA (skala menengah)	(room 02), Jalan Tuna IV No.77 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Daging Tetelan Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Cumi-cumi Beku 5. Salmon Beku, Trout Beku	Baru
4	1 Oktober 2025	2 Oktober 2025	CV. VICTORY FRIENDCIPLE (skala kecil)	Jl. Tuna 2 Blok K No. 78 Room B Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Makarel Beku	Baru

5	2 Oktober 2025	7 Oktober 2025	PT NUTICA PRIMA PERKASA (skala menengah)	Jl. Yos Sudarso Kaw. 46-48 Blok C/2A Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Ikan Beku Pelagis	Baru
6	3 Oktober 2025	3 Oktober 2025	PT. Triguna Lestari Sejahtera (skala menengah)	Kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jl. Dermaga Ujung/Pendaratan Ikan, RT005/RW003, No. 5 ICS - Room 2) Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Ikan Pelagis Beku 2. Cephalopoda Beku	Baru
7	3 Oktober 2025	3 Oktober 2025	PT. MENARA RAHARI NUSANTARA (skala kecil)	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Jl. Pendaratan Ikan RT 005/RW 003 (Room CS1), Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cumi-cumi Beku 2. Ikan Pelagis Beku	Baru
8	3 Oktober 2025	4 Oktober 2025	PT. JAJA SEMBILAN (skala menengah)	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jl. Tuna Raya No. 3A Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Ikan Pelagis Beku 2. Tuna Beku	Baru

9	6 Oktober 2025	7 Oktober 2025	ARTA MINA TAMA (skala Kecil)	Jl. Cumi Raya Blok E No.1A PPS Nizam Zachman Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Tuna Beku 2. Ikan Demersal Segar 3. Tuna Segar 4. Cephalopoda Beku 5. Salmon Beku 6. Hiu Beku 7. Ikan Pelagis Beku 8. Ikan Demersal beku	Perpanjangan
10	10 Oktober 2025	10 Oktober 2025	(PT) MITRA LAUT INTERNASIONAL (skala menengah)	Jl. Pendaratan Udang Gudang Unit Pengolahan Ikan No.3 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cephalopoda Beku 2. Salmon Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Ikan Pelagis Beku	Perpanjangan
11	13 Oktober 2025	14 Oktober 2025	PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK (skala besar)	Jl. Muara Baru Ujung Blok K No. 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cephalopoda Beku 2. Ikan Demersal Beku 3. Tuna beku 4. Salmon Beku 5. Salmon Beku, Trout Beku 6. Hiu Beku 7. Kerang Beku 8. Ikan Pelagis Beku 9. Sirip Hiu Beku	Perpanjangan
12	13 Oktober 2025	16 Oktober 2025	PT. QFI PRIMA MANDIRI (skala kecil)	Jl. Cakung Cilincing Timur, Type Biz C1 Hoek, Blok Green Sedayu 17, No. 001 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur DKI Jakarta	1. Salmon segar, Trout segar 2. Salmon Beku, Trout Beku 3. Cumi-cumi Beku 4. Ikan Pelagis Beku 5. Scallop Beku	Perpanjangan

13	13 Oktober 2025	14 Oktober 2025	PT. ANDIRA INTERNUSA GEMILANG (skala besar)	Jl. Jawa Blok G-1 Kel. Ganda Mekar, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Ikan Pelagis Beku 2. Ikan Demersal Beku 3. Cephalopoda Beku 4. Daging Tuna Beku 5. Salmon Beku	Perpanjangan
14	15 Oktober 2025	16 Oktober 2025	PT. ANUGERAH MINA SEJAHTERA (skala besar)	Jl. Tuna VI Blok A No.2 Muara Baru Ujung Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI 14440	1. Ikan Pelagis Beku 2. Tuna Beku 3. Ikan Bandeng Beku 4. Ikan Air Tawar Beku 5. Salmon Segar, Trout Segar 6. Ikan Demersal Beku 7. Hiu Beku	Perpanjangan
15	17 Oktober 2025	20 Oktober 2025	PT. MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCES (skala besar)	Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Centre, Blok F, No. 7,8,9, Marunda Makmur Kel. Sagara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Tepung Agar-agar 2. Tepung Alginat 3. Tepung Karagenan	1-2 perpanjangan 3Baru
16	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	PT. TRITUNGGA LINTAS BENUA (skala besar)	Jl. Tekno 1 Kawasan Industri Jababeka III B 1 L Kel. Pasir Gombong, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Scallop Beku 5. Salmon Beku, Trout Beku 6. Salmon Segar, Trout Segar 7. Cephalopoda Beku	Perpanjangan
17	23 Oktober 2025	24 Oktober 2025	PT. KEMBANG ALAM (KHATULISTIWA (skala menengah)	Jl. Muara Baru Ujung Blok T No. 11-12 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Ikan Pelagis Bernilai Tambah Beku	Baru

18	23 Oktober 2025	27 Oktober 2025	PT. NUTRINDO INTERFARMA SEJAHTERA (skala besar)	Jl Sungai 1 blok F 26 no 8 Kel. CICAU, Kec. CIKARANG PUSAT, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Minyak Ikan	Baru
19	28 Oktober 2025	29 Oktober 2025	PT. CLASSIC FINE FOODS INDONESIA (skala besar)	Komplek Pergudangan Bgr, Jl. Boulevard Bgr No.01 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Tiram Segar 2. Kerang Masak Beku 3. Gurita Rebus Beku 4. Ikan Demersal Utuh Beku 5. Kepiting Masak Beku 6. Kepiting Beku 7. Telur Ikan Sturgeon Segar 8. Telur Ikan Sturgeon Beku 9. Kerang Rebus Dingin	Baru
20	29 Oktober 2025	30 Oktober 2025	PT. AWINDO INTERNATIONAL (skala menengah)	Jl. Cumi Raya No.7 Pelabuhan Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara	1. Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku	Perpanjangan

No	Tanggal Inspeksi	Tanggal Sertifikat	Nama UPI/UPRL	Alamat	Jenis Produk	Status
1	3 November 2025	4 November 2025	PT. GABUNGAN ERA MANDIRI (I) (skala menengah)	Jl. Tuna II Blok J No 4 Penjarangan, Kec. Penjarangan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cephalopoda Beku 2. Abon Ikan 3. Tuna Beku 4. Tuna Loin Masak Beku 5. Ikan Pelagis Beku	Perpanjangan
2	5 November 2025	6 November 2025	PT. OKSH INDONESIA (skala besar)	Jl. Caringin No.03 RT 001 RW 004 Kel. Bojong Monteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat	1. Tepung Tulang Ikan 2. Tepung Agar-agar 3. Seaweed Flakes/Powder 4. Sodium Alginat 5. Omega 3 Acid Ethyl Ester 90 Oil 6. Minyak Salmon 7. Tepung Karagenan 8. Asam Alginat	1-7 Perpanjangan 8 Baru
3	10 November 2025	11-11-2025	PT. UNIMITRA ANDALAN SEJATI (skala besar)	Jl. Tekno 1 Kawasan Industri Jababeka III Kel. C.3.B Pasir Gombong, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Salmon Segar, Trout Segar 2. Fillet Ikan Pelagis Segar 3. Scallop Beku	Perpanjangan
4	11 November 2025	12 November 2025	BEKASI PRESTO (skala mikro)	Jl. Raya Pasar Babelan No 46 RT.01 RW.01 Kel. Babelan, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Otak-otak Bandeng 2. Bakso ikan 3. Tahu Bakso ikan 4. Bandeng Presto	Perpanjangan Baru Baru Perpanjangan

5	12 November 2025	13 November 2025	PT. LOLA MINA (skala besar)	Jl. Muara Baru Ujung Blok N Kav. 5-6 Kel. Penjarangan Kec. Penjarangan Kota Jakarta Utara	1. Udang Beku 2. Cumi-cumi Beku	Perpanjangan
6	12 November 2025	12-Nov-25	PT. TRITUNGGA LINTAS SAMUDRA (skala menengah)	Jl. Dermaga Ujung 2 No.2 Room 5 RT 001 RW 022 Kel. Pluit, Kec. Penjarangan, Kota Jakarta Utara	1. Cephalopoda Beku 2. Udang Beku 3. Ikan Pelagis Beku 4. Ikan Bandeng Beku 5. Ikan Demersal Beku 6. Daging Kerang Beku	Perpanjangan
7	Tanpa inspeksi	12-Nov-25	PT. KIU KIU FISHERY (skala menengah)	Jl. Tuna II Blok K 7 B Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Cephalopod Beku	Perpanjangan
8	14 November 2025	17 November 2025	DAPORCHESYA (skala mikro)	Perum Mustika Wanasari Blok A6 No.39 Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi	1. Pempek Kriuk 2. Pempek Ikan	Perpanjangan

9	14 November 2025	17 November 2025	PT. ASIA PANGAN SENTOSA (skala besar)	Jl. Bandengan Utara Kaw. 81 Blok B No.10-12 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Ikan Pelagis Segar 2. Ikan Pelagis Beku 3. Ikan Demersal Segar 4. Udang Beku 5. Udang Segar 6. Kerang Segar 7. Kepiting Segar 8. Kerang Beku 9. Telur Bulu Babi Segar	Baru
10	18 November 2025	18 November 2025	PT. GABUNGAN SAMUDERA INTERNASIONAL (skala besar)	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Pendaratan Ikan No.05 RT 005 RW 003 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Salmon Segar, Trout Segar 2. Ikan Air Tawar Beku	Perpanjangan Baru
11	18 November 2025	21 November 2025	PT BERKAH TUNA SAMUDERA (skala menengah)	Jl. Tuna 6, Ruang proses No. 10 Dermaga Barat Pelabuhan Muara Baru Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Tuna Beku 2. Ikan Pelagis Beku 3. Daging Tuna Beku 4. Cephalopoda Beku 5. Salmon Beku 6. Ikan Demersal Beku	Perpanjangan
12	19 November 2025	20 November 2025	PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK (skala besar)	J. Muara Baru Ujung Blok K No. 7D Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKO Jakarta	1. Ikan Bandeng Beku	Baru

13	19 November 2025	21 November 2025	CV. MINA NUSANTARA (skala menengah)	Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jl. Pari Raya Blok 5 No.4-5 RT 20 RW 17 (Room 4) Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Ikan Pelagis Beku 2. Cephalopoda Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Salmon Beku, Trout Beku 5. Daging Tetelan Tuna Beku	Perpanjangan
14	19 November 2025	26 November 2025	PT. TOBA MINA SEJAHTERA (skala menengah)	Komplek Perkantoran dan Pergudangan Muara Baru Blok B 1-7 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	1. Cephalopoda Beku 2. Daging Tetelan Tuna Beku 3. Salmon Beku, Trout Beku 4. Ikan Demersal Beku 5. Ikan Pelagis Beku	Baru
15	Tidak Inspeksi	18 November 2025	MW BAKERY AND CAKE (skala mikro)	Perum Bumi Sindang Asri Blok B3/15 002/010 Kel. Sindangmulya, Kec. Cibarusah, Kabupaten Bekasi	1. Roti Ikan 2. Pastel Abon Ikan 3. Nila Krispi 4. Otak-otak ikan	Perpanjangan

No	Tanggal inspeksi	Tanggal Serifikat	Nama UPR/UPR	Alamat	Nama Inspektur Mutu	Jenis Produk	Status
1	1 Desember 2025	1 Desember 2025	PT. FISHINDO LINTAS SAMUDRA (skala menengah)	Jl. Dermaga Ujung 2 No. 2 Room 4 RT 002 RW 022 Kel. Penjaringan, Kec. Pluit, Kota Jakarta Utara	1. Dede Suhendra (Ketua) 2. Dimas Adi Wibowo	1. Cephalopoda Beku 2. Udang Beku 3. Ikan Bandeng Beku 4. Ikan Pelagis Beku 5. Daging Kerang Beku 6. Ikan Demersal Beku	Perpanjangan
2	1 Desember 2025	3 Desember 2025	PT. SEGARA LINTAS TERPADU (skala mikro)	Jalan Dermaga 1 No.4, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara - DKI Jakarta Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Nugroho Andi Cahyono (Ketua) 2. Philipus Pria Pranata	1. Ikan Pelagis Beku 2. Salmon Beku	
3	1 Desember 2025	1 Desember 2025	PT. SARDAYA Cipta LESTARI (skala besar)	Kawasan Industri Jababeka III, Jl. Tekno Raya Blok A – Sa Kel. Padipombong, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Dedi Supardi (Ketua) 2. Diah Ayu Kurniasari	1. Ikan Demersal Beku 2. Cephalopoda Beku 3. Daging Kerang Beku 4. Salmon Beku, Trout Beku 5. Ikan Pelagis Beku	Baru
4	3 Desember 2025	3 Desember 2025	PT. SINAR LAUTAN TERPADU (skala besar)	II. Dermaga Muara Angke No. 17 – 20 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1. Nugroho Andi Cahyono (Ketua) 2. Fishenger V.D. Sihaya	1. Telur Ikan Beku 2. Sirip Hiu Beku 3. Telur Ikan Terbang Beku 4. Ikan Asin Kering 5. Kapiting Beku	Perpanjangan
5	4 Desember 2025	5 Desember 2025	PT. MITRA TIMUR RAYATAMA (skala kecil)	Jl. Dermaga No.1 Pelabuhan Penyeberangan Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	1. Dimas Adi Wibowo (Ketua) 2. Philipus Pria Pranata	1. Ikan Pelagis Beku 2. Ikan Demersal Beku 3. Tuna Beku 4. Cephalopoda Beku	Perpanjangan
6	5 Desember 2025	8 Desember 2025	PT INDOBOGA JAYA MAKNUH (skala menengah)	II. Cumi Raya No.3 Muara Baru Gudang Kel. Penjaringan, Jakarta Utara	1. Philipus Pria Pranata (Ketua) 2. Dimas Adi Wibowo	1. Ikan Demersal Beku 2. Ikan Pelagis Beku	Perpanjangan

7	5 Desember 2025	10 Desember 2025	(PT) AWINDO (skala menengah)	Jl. Arco Galangan Kapal, Kawasan PPS Nizam Zachman Kel. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Fishenger Victor Dimag Sihaya (Ketua) 2. Ridwan	1. Ikan Demersal Beku 2. Cephalopoda Beku	Perpanjangan
8	9 Desember 2025	10 Desember 2025	(PT) KITA MAJU JAYA (skala menengah)	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, (Jl.Tuna Raya Blok. C Muara Baru	1. Diah Ayu Kurniasari (Ketua) 2. Philipus Pria Pranata	1. Tuna Beku 2. Cephalopoda Beku 3. Ikan Pelagis Beku 4. Ikan Demersal Beku	Baru
9	17 Desember 2025	18 Desember 2025	PT. KATRA MANDIRI CITRAMINA (skala besar)	Jl. Cumi Raya No.5, Kawasan PPS Nizam Zachman Muara Baru Kel. Penjaringan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta 14460	1. Fishenger V.D Sihaya (Ketua) 2. Diah Ayu Kurniasari	1. Tuna Loin Masak Beku 2. Ikan Pelagis Beku 3. Ikan Demersal Beku	Perpanjangan

10	18 Desember 2025	19 Desember 2025	PT. KICHYA INDONESIA (skala besar)	Jl. Cempaka No. 12 RT 03 RW 02 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	1. Nugroho Andi Cahyono (Ketua) 2. Dimas Adi Wibowo	1. Fillet Ikan Segar 2. Fillet Ikan Beku 3. Ikan Demersal Segar 4. Ikan Demersal Beku 5. Ikan Pelagis Segar 6. Ikan Pelagis Beku 7. Cephalopoda Segar 8. Cephalopoda Beku 9. Telur Ikan Segar 10. Telur Ikan Beku 11. Kerang Segar 12. Udang Segar 13. Udang Beku 14. Tuna Segar 15. Tuna Beku 16. Kepiting Segar 17. Kepiting Beku 18. Hati Ikan Segar 19. Hati Ikan Beku 20. Salmon Segar, Trout Segar 21. Salmon Beku, Trout Beku 22. Bulu Babi Segar 23. Bulu Babi Beku 24. Telur Bulu Babi Segar 25. Telur Bulu Babi	Perpanjangan 26. Baru
11	18 Desember 2025	22 Desember 2025	PT. CHARLY WIJAYA TUNA (skala besar)	Jl. Muara Baru Ujung, Pelabuhan Muara Baru Blok K/7C Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan, Kota Jakarta Utara	1. Esti Rahayu (Ketua) 2. Philipus Prita Pranata	1. Tuna Utuh Beku 2. Cephalopoda Beku 3. Ikan Demersal Beku 4. Ikan Pelagis Beku 5. Hiu Beku	Perpanjangan

12	Tidak Inspeksi	19 Desember 2025	SILE (skala mikro)	Graha Ferdi Sukadani Blok B 06/17 Kel. Sukadani, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	Tidak Inspeksi	1. Teri Goreng Kering 2. Kempluk Tulang Ikan 3. Abon Lela 4. Nugget Ikan	Perpanjangan
13	Tidak Inspeksi	23 Desember 2025	Amar Food (skala mikro)	Jl. Muara Baru Tembok Bolong RT 003/017, Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	Tidak Inspeksi	Kempluk Kulit Ikan	Perpanjangan
14	23 Desember 2025	24 Desember 2025	CV. INDO PACIFIC (skala besar)	Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nirim Zachman Jl. Tuna II No. 3 Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Dimas Adi Wibowo 2. Ni Luh Putu Ari Susanti	1. Udang Beku 2. Ikan Air Tawar Beku	Perpanjangan
15	24 Desember 2025	24 Desember 2025	(PT) ARROHMAN SEGARA INDONESIA (skala mikro)	Jl. Dermaga Muara Angke No. 88 Room 1 Kel. Muar, Kec. Penjarangan, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta	1. Nugroho Andi Cahyono 2. Olah Ayu	1. Ikan Pelagis Beku 2. Ikan Demersal Beku 3. Cephalopoda Beku 4. Ikan Rendeng Beku 5. Udang Beku 6. Daging Kerang Beku 7. Salmon Beku	Perpanjangan 7. Baru
16	Tidak Inspeksi	25 Desember 2025	DAPUR MAHAZ (skala mikro)	Jl. Gatot Subroto Gg 1K Muli No 96 Kel. Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	Tidak Inspeksi	1. Pempek Ikan	Perpanjangan
17	Tidak Inspeksi	25 Desember 2025	MW Bakery and Cake (skala mikro)	Perum Bumi Sindang Asri Blok B3/15 002/010 Kel. Sindangmulya, Kec. Obaruwah, Kabupaten Bekasi Jawa Barat	Tidak Inspeksi	1. Kripik Ikan	Baru

58.	30 Desember 2025	30 Desember 2025	PT. AYANNA PUTRI PRATAMA (akala menengah)	Jl. Sunter Kemayoran No. 126 RT 000 RW 009 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara 090 Jakarta	1. Risa Antoniningsari (Kerwa) 2. Nugroho Andi Cahyono	1. Tuna Beku 2. Kepiting Beku 3. Cumi-Cumi Beku 4. Cumi-Cumi Segar 5. Kepiting Segar 6. Udang Segar 7. Udang Beku 8. Lobster Beku 9. Lobster Segar 10. Sotong Beku 11. Sotong Segar 12. Kerang Beku 13. Kerang Segar 14. Ikan Paklago Segar 15. Ikan Paklago Beku 16. Ikan Demersal Segar 17. Ikan Demersal Beku 18. Telur Ikan Beku 19. Telur Ikan Segar 20. Salmon Segar, Trout Segar 21. Ikan Kering Beku 22. Salmon Beku, Trout Beku 23. Fillet Salmon Beku 24. Fillet Salmon Segar 25. Baku Babi Segar 26. Baku Dabit Beku	Perpanjangin
-----	------------------	------------------	---	---	--	--	--------------



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**

JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320
TELEPON (021) 43903634, 4371804, FAKSIMILE (021) 43903634
LAMARAN: www.kkp.go.id SUREL: dkp@kp.kitadikn.go.id

**SURAT PENGANTAR
NOMOR B.40/BKIPM/JKT.II/TU.210/V/2026**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	IKU 2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV Tahun 2025	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Jakarta, 9 Januari 2026
Penanggung Jawab Laporan

Dede Suhendra, S.Pi., M.Si

PERHITUNGAN UNTUK PERSENTASE (%) JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN di WILAYAH KOTA JAKARTA UTARA SEMESTER I TAHUN 2025

A. Penilaian sarana dan prasarana

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat Baik	100	-
Baik	75	3
Cukup	50	-
Kurang	30	-
Total		3

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria buruk

$$\frac{3 \times 75}{3} = 75$$

B. Penilaian pengujian produk

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata - rata} = 1/n \sum_{i=1}^n (i - 1)^n \equiv fY_{-}(i) /$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan :

$$(7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7) / 9 = 7 \times 10 = 70$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E.coli, Formalin dan Salmonella rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria E.coli	Kriteria Salmonella	Kriteria Formalin	Nilai/skor
>5 x 10 ²	0	Positif	0	0
<5 x 10 ²	5	Negatif	5	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria $>5 \times 10^2$ dan $<5 \times 10^2$

$$\frac{0 \times 10}{9} + \frac{9 \times 100}{9} = 100,00$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >3 dan <3

$$\frac{0 \times 10}{9} + \frac{9 \times 100}{9} = 100,00$$

Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{9} + \frac{9 \times 100}{9} = 100,00$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{9} + \frac{9 \times 100}{9} = 100,00$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$\text{rata} = \text{rata} = 1/n \sum_{i=1}^n V_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = 70
2. Nilai kriteria bakteri ALT = 100
3. Nilai kriteria bakteri E.coli = 100
4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = 100
5. Nilai kriteria Formalin = 100

Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan

$$\frac{70 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} = 94$$

C. Penilaian Jaminan mutu

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = 75,00
2. Nilai pengujian produk = 94,00

$$(60\% \times 75,00) + (40\% \times 94,00) = 45,00 + 37,60 = 82,60 \%$$

Becara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Jakarta Utara pada semester I tahun 2025 82,60 % dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan 17,40% dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.

Diperiksa oleh : Aprini Awalia, S.Tr. PI

Tanggal : 2 Juni 2025

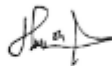
Tanda Tangan:



Disetujui oleh : Hendri, S.PI, M.Si

Tanggal : 3 Juni 2025

Tanda Tangan :





KEMENTERIAN
KEHUTANAN DAN
PERIKANAN



RESUME GIAT KEGIATAN

PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INPRES 01 TAHUN 2017	
Nama Kegiatan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Negeri di Kota/Kab Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta
Narasi Kegiatan	<p>Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik merupakan Implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).</p> <p>Sehingga menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan No.45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat;</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan pada sentra-sentra penyedia pangan sehat di pasar modern dan pasar tradisional di Kota/Kab Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Lokus kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasar Tradisional :<ol style="list-style-type: none">1) Pasar Koja Baru, dengan sampel :<ol style="list-style-type: none">a. Udang Vannameib. Kembungc. Kakap2) Pasar Sunter Podomoro, dengan sampel :<ol style="list-style-type: none">a. Udang Vannameib. Kembungc. Bandeng2. Pasar Modern :<ol style="list-style-type: none">1) Lottmart Kelapa Gading, dengan sampel :<ol style="list-style-type: none">a. Udang Vannameib. Baronangc. Kembung



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



Unit Kerja yang Terlibat	1. Balai KIPM Jakarta II 2. BUSPM BPPMHKP 3. Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta 4. Suku Dinas KPKP Kota Jakarta Utara 5. Lottemart Kelapa Gading 6. PD Pasar KoJa Baru 7. PD Pasar Sunter Podomoro
Petugas	1. Dede Suhendra, S.PI, M.Si 2. Dedi Supardi, S.St.PI 3. Nindya Hambar Wasisto, S.PI, M.Si 4. Maryam Ulfa Letuconsina, S.Kel, M.Si 5. Nugroho Ardi Cahyono, S.St.PI, M.Eng 6. Esti Rahayu, A.Md, S.Si 7. Diah Ayu Kumalasari, A.Md 8. Ridiwan, A.Md 9. Ir. Raymond Agustinus Pelupessy, M.Si 10. Ni Luh Putu Ari Susanti, A.Md.PI 11. Fishenger Victor Dinug Blahaya, S.St.PI 12. Dimas Adi Wibowo, A.Md 13. Risna Azriatiningsari, A.Md, S. Si 14. Sumayani, S.PI, M.Tr.PI 15. Philipus Pria Pranata, A.Md 16. Meyka Ekaristi Suci, A.Md
Waktu Pelaksanaan	13 Maret 2025 Pukul : 07.00 – 15.00 WIB
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	Surat Tugas Nomor : B.307/BKIPM.JKT.II/KP.440/III/2025, tanggal 11 Maret 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

A. PASAR KOJA BARU





DEPARTEMEN
PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN DAN
PERIKANAN



B. PASAR SUNTER POOMORD



DEPARTEMEN
PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN DAN
PERIKANAN





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 4	: Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Jakarta II (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	8m.I	Q3	Q4	8m.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Catatan :

- Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
8m I = Capaian Q1 + Capaian Q2
8m 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi
<ul style="list-style-type: none">Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.Bertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Cepelan Indikator Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan lingkup Balai KIPM Jakarta II triwulan IV sudah terealisasi, dengan persentase adalah 100% tidak ada penolakan jumlah HC oleh negara tujuan.

Jumlah HC yang diterbitkan pada triwulan IV adalah sebanyak 3413 Sertifikat, pada bulan Oktober sebanyak 1229, bulan November sebanyak 1102 dan Desember sebanyak 1082 sertifikat dan tidak ada penolakan.

a. Cepelan Iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$X \frac{A - B}{A}$$

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A - HC yang diterbitkan oleh BPPM/KIP B - Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi Penolakan harus/penolakan HC mutu dilampirkan)

Akar Masalah

–

Tindakan yang telah dilaksanakan

–

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
--	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan pengawasan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan	Tw.4 Tahun 2025

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR
LINGKUP BALAI KIPM JAKARTA II

Nama Unit Kerja : Balai KIPM Jakarta II
 Periode Laporan : Triwulan IV

Uraian Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025				
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	93	100	100	100	100

Uraian Capaian Indikator :

Capaian Indikator Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II Triwulan IV sebesar 100% dengan merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Rincian jumlah HC ekspor serta perhitungan capaian MK sebagai berikut :

Bulan	Jumlah HC yang diterbitkan	Jumlah HC yang ditolak negara tujuan	Persentase
Oktober	1229	0	100%
November	1182	0	100%
Desember	1082	0	100%
Total	3413	0	100%
$x \frac{A - B}{A}$			$x \frac{3413 - 0}{3413}$

A = HC Ekspor yang diterbitkan

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Sumber data : SiapMutu

Penanggung Jawab Kegiatan

Dede S. Hendra, S.Pi., M.S.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**

JALAN SWASEMBADA TIMUR XII NO. 64, TANJUNG PERIK, JAKARTA UTARA 14320
TELEPON (021) 43803634, 4371004, FAKSIMILE (021) 43803634
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bagaswarta2005@yahoo.co.id

**SURAT PENGANTAR
NOMOR B.36/BKIPM JKT II/TU.210/I/2026**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	IKU 4 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup Balai KIPM Jakarta II Trwulan IV Tahun 2025	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 9 Januari 2026

Penanggung Jawab Laporan



Dede Suhendra, S.Pi., M.Si

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 111/SJ.2/RC.610/II/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Ptt. Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

Tanggal : 10 Januari 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2025 sebesar 90,31 dari target nilai 92.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Jenderal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

126	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	87.54	100.00	50.00	100.00	77.19	100.00	90.85	100%	0.00	90.85
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
				Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	5.00	10.00	7.72	25.00					
				Nilai Aspek	93.77		81.80				100.00					
127	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	73.17	100.00	50.00	100.00	94.79	100.00	90.45	100%	0.00	90.45
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
				Nilai Akhir	10.00	10.98	20.00	5.00	10.00	9.48	25.00					
				Nilai Aspek	86.59		86.20				100.00					
128	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	81.45	98.15	50.00	100.00	94.29	100.00	91.28	100%	1.00	90.28
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
				Nilai Akhir	10.00	12.22	19.63	5.00	10.00	9.43	25.00					
				Nilai Aspek	90.73		85.61				100.00					
129	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	54.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.18	70%	0.00	90.26
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	8.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	77.28		100.00				100.00					
130	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	62.64	82.57	100.00	100.00	93.17	100.00	90.23	100%	0.00	90.23
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
				Nilai Akhir	10.00	9.40	16.51	10.00	10.00	9.32	25.00					
				Nilai Aspek	81.32		93.94				100.00					
131	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	79.26	100.00	50.00	100.00	81.86	100.00	90.08	100%	0.00	90.08
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
				Nilai Akhir	10.00	11.89	20.00	5.00	10.00	8.19	25.00					
				Nilai Aspek	89.63		82.97				100.00					

hal : 22 dari 30 halaman

tanggal cetak : 10-01-2010 04:40:01 oleh : KL032

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 138/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Para Sekretaris Badan
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN
Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan Capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5 sebagaimana data terlampir.
2. Capaian IK NKPA level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKPA Tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP (terlampir).
3. Capaian IK NKPA level 0 (KKP) masih dalam proses koordinasi perbaikan system aplikasi Monev Kemenkeu sehubungan tidak dapat dilakukan penginputan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada aplikasi SAKTI dengan keterangan error.
4. Penyempalan capaian IK NKPA level 0 (KKP) paling lambat kami sampaikan tanggal 15 Januari 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara kami mengucapkan terima kasih.

 Ditandatangani
Secara Elektronik
Sutrisno Subagyo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KKP
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. Urut	Kode Subansi Kerja	Detail Kerja	Jumlah Perencanaan Anggaran	Efektifitas		Efisiensi	
				Capaian RK	Penggunaan SBK	Ekonomi SBK	
1	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	85,00	200,00	90,00	200,00	
2	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	52,50	200,00	100,00	50,00	
3	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	200,00	100,00	100,00	
4	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	200,00	100,00	100,00	
5	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	10,00	100,00	100,00	
6	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	200,00	10,00	10,00	
7	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	200,00	10,00	100,00	
8	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	200,00	100,00	100,00	
9	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	200,00	100,00	100,00	
10	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	200,00	10,00	0,00	
11	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	200,00	10,00	0,00	
12	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	10,00	100,00	100,00	
13	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	10,00	100,00	100,00	
14	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	200,00	100,00	100,00	
15	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	200,00	100,00	100,00	
16	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	10,00	10,00	10,00	
23	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	10,00	10,00	10,00	
24	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
26	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	10,00	10,00	10,00	10,00	
29	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
30	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
35	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	001.01.0000	Subansi Kerja 1, 2 dan 3	100,00	100,00	100,00	100,00	

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 82/ITJ/RC.610/X/2025

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal KKP
2. Para Dirjen lingkup KKP
3. Para Kepala Badan lingkup KKP
Dari : Inspektur Jenderal
Lampiran : Satu Halaman
Hal : Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP
Tanggal : 07 Oktober 2025

Bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" lingkup KKP sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran I.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
 2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
-

Lampiran
 Nomor : 82/ITJ/RC.610/X/2025
 Tanggal : 07 Oktober 2025

**Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
 atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	C	d	E
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.885.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama IKU 1 : Indeks Profesionalitas ASN Inklusif UPT Balai KIPM Jakarta II (Indeks).

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	-	82	82	-	82	82	82	82	82
Realisasi	-	84,80	84,80	-	88,22	88,22	84,01	-	-
% Capaian	-	103,41	103,41	-	101,48	101,48	102,46	-	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4.

Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025.

Isu utama dan implikasi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Cara Pengukuran:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} + R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} + R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} + R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} + R_{4m}$$

Keterangan:

IP : Indeks Profesionalisme

IP_i : Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} + R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} + R_{2k}$: Bobot indikator Kualifikasi ke-k Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} + R_{3l}$: Bobot indikator Kualifikasi ke-l Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} + R_{4m}$: Bobot indikator Kualifikasi ke-m Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Akar Masalah

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan pelatihan profesi untuk Kualitas para anggota ASN.	Ketua Tim Dukungan Manajemen Teknis	TW. 4 tahun 2025

IP ASN Semester II Balai KIPM Jakarta II

IP ASN 2025												
	Dashboard	Detail	Page	FAQ	IP ASN 2024							
3	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	21	23.31	92.02%	33.85	84.73%	25	82.02%	0	900%	8128	18608
4	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	26	21.68	93.81%	34.87	86.81%	25	83.02%	0	900%	8601	18608
5	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	18	22.12	85.84%	33.72	76.42%	28	81.02%	8	900%	8480	18608
6	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	37	22.7	83.84%	38	81.1%	25.27	81.28%	8	900%	8707	18608
7	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	20	22.5	94.1%	38.05	73.85%	28	83.01%	5	900%	8258	18608
8	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	48	22.30	91.01%	31.54	81.85%	25	81.01%	0	900%	8645	18608
9	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	78	22.70	82.01%	35	90.1%	25	82.02%	0	900%	8078	18608
10	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	38	22.81	87.84%	34.47	88.7%	28	83.01%	8	900%	8839	18608
11	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	19	23	82.1%	31	77.1%	28	81.01%	8	900%	84	18608
12	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	10	21.81	84.44%	31	77.1%	258	73.7%	5	900%	135	18608
13	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	41	22.38	82.2%	34.54	80.95%	25	83.01%	5	900%	8758	18608
14	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	10	22.71	80.84%	33.80	87.7%	25	82.01%	0	900%	8600	18608
15	IP ASN 2024 (10/10/2024) 10/10/2024	72	22.3	95.1%	28.7%	73.1%	25	83.01%	4.78	95.8%	8704	18608



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sef.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 02 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di

tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputi RB Kunwas Nomor B/841/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5330 / BPPMHKP.1/RC.610 /XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar **Nilai 86. Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.** Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	SKPM MUTUJAM	27.6	27.6	13.8	22	86	A
2	SKPM SEKRETARIAT	27	27	13.5	22.5	80	A
3	BPPMHKP	27	27	13.5	22.5	80	A
4	SKPM MUKESWAR	27	27	13.5	22.5	80	A
5	SKPM BANDUNG	27	27	13.05	22.5	88.55	A
6	SKPM ACEH	27.6	27	13.5	21.55	88.55	A
7	SKPM JAMBI	27	27	13.15	22	88.15	A
7	PUSAT MANAJEMEN MUTU	27	27	13.6	22.5	88.1	A
8	SKPM LUMBUK BUNGGAI	26.1	27	13.5	22.5	88.1	A
9	BUS-PM	27.6	25.2	13.5	22.5	88.6	A
10	SKPM MEDAN I	27	27	13.15	22.5	88.65	A
11	SKPM PALLANGKARAYA	27	27	13.6	22	88.6	A
12	SKPM TARAKAN	27	25.2	13.5	22.5	88.2	A
13	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	27	27	13.5	21	88.5	A
14	PUSAT MUTU PASCA PUNEN	27	27	13.5	21	88.5	A
15	SKPM SUNJURUGIN	27	25.2	13.5	22.5	88.5	A
16	SKPM CIRESON	26.1	27	13.6	22.5	88.2	A
17	SKPM PULANGBUNG	27	25.2	13.05	22.5	88.05	A
18	SKPM PONTIANAK	27	27	13.75	21.55	88	A
19	SKPM PEKINJESRU	27	27	13.5	22.5	88	A
20	SKPM PALU	27	27	11.6	22.5	87.8	A
21	SKPM SURABAYA II	27	27	13.6	21.55	87.65	A
22	SKPM MEDAN II	27	26.6	11.65	22.5	87.75	A
23	SKPM PADANG	27	25.2	13.6	22.5	87.6	A
24	SKPM RINTONG	27	25.2	13.8	21.55	87.65	A
25	SKPM BALIKPAPAN	27	27	13.5	22	87.5	A
26	SKPM GORONTALO	27.6	26.6	13.6	22.5	87.5	A
27	SKPM TULUNG	26.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	SKPM JEMBER	27	25.2	13.5	21.55	87.55	A
29	SKPM SORONG	25.2	26.1	13.05	22.5	87.15	A
30	SKPM KUPANG	27	27	11.65	21.55	87.1	A
31	SKPM PANGKAL PINANG	27	27	11.65	21.55	87.1	A
32	SKPM MUNDO	27	26	13.5	22.5	87	A
33	SKPM SEMARANG	27	26	13.5	22.5	87	A
34	SKPM YOGYAKARTA	27	26	13.5	22.5	87	A
35	SKPM JAKARTA I	27	27	13.9	22	86.9	A
36	SKPM DENPASAR	27	27	13.55	22.5	86.55	A
37	SKPM TERNATE	27	27	13.5	22.5	86.5	A
38	SKPM SENGKULU	27	25.2	13.05	21.55	86.5	A
39	SKPM TJ. SELAJ LUBAHAN	25.2	27	11.65	22.5	86.55	A
40	SKPM BIMA	25.2	25.2	13.05	22.5	86.55	A
41	SKPM SURABAYA I	26.1	26.1	13.05	21.55	86.5	A
42	SKPM MERLUKE	25.2	27	13.75	21.55	86.5	A
43	SKPM LAMPUNG	27	25.2	13.5	20.75	86.45	A
44	SKPM BATUM	27	25.2	13.9	21	86.4	A
45	SKPM JAKARTA II	27	27	11.55	21	86.55	A
46	SKPM MERLUK	25.2	25.2	13.75	22.5	86.55	A
47	SKPM MAMUJU	25.2	25.2	13.75	22.5	86.55	A
48	SKPM BANGGAS	26.1	27	11.65	21.55	86.2	A
49	SKPM TANJUNG PINANG	26.9	27	13.75	21.5	86.15	A
50	SKPM DENPASAR	27	26	13.6	21	86.6	A
51	SKPM JAYAPURA	22.7	22.7	12	15.5	86.8	B

- Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (≥86 Nilai) yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
- Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 20 Satker dengan dibawah target (≤86 Nilai) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2026;
- Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMHKP Tahun 2025 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan.



Dikandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Satrio

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Basaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, linoah dan akuntabel dalam bidang
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 11 : Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Balai KIPM Jakarta II (Indeks).

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	-	-	-	-	88	88	88	88	88
Realisasi	-	-	-	-	88,26	88,26	88,26	-	-
% Capaian	-	-	-	-	100,28	100,28	100,28	-	-

Catatan :
Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4.
Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian diakhir tahun 2025.

Isu utama dan implikasi

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

Cara Pengukuran:

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

Kategori	Nilai	Prediksi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Akar Masalah

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Ketua Tim Dukungan Manajemen Teknis	TW. 4 tahun 2025

Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sert.bppmhkp@kp.go.id

Nomor : 1/BPPMHKP.1/RC.610/1/2025 02 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di
tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Pemen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputy RB Kunwas Nomor B/641/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5339 / BPPMHKP.1/RC.610 /XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar Nilai 86. Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	SKPM MATARAM	27.6	27.6	13.8	20	84	AA
2	SEKRETARAT RIPTM-BK	27	27	13.5	22.5	80	A
3	BKPM WAKASSAR	27	27	13.5	22.5	80	A
4	SKPM BALIKUNG	27	27	13.05	22.5	86.05	A
5	SKPM ACEH	27.6	27	13.5	21.25	85.35	A
6	SKPM JABAR	27	27	12.75	23	86.75	A
7	PUSAT MANAJEMEN MUTU	27	27	12.8	22.5	89.1	A
8	SKPM LUMAJANG	20.1	27	13.5	22.5	89.1	A
9	RUPS PM	27.6	25.2	13.5	22.5	89.8	A
10	SKPM MEDAN	27	27	12.75	22.5	88.05	A
11	SKPM PS. ANGKAPURA	27	27	12.6	22	88.6	A
12	SKPM TANGKAR	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
13	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	27	27	13.5	21	88.5	A
14	PUSAT MUTU PASCA PANEN	27	27	13.5	21	88.5	A
15	SKPM BALUBALUBAN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
16	SKPM CIBINONG	20.1	27	12.8	22.5	88.2	A
17	SKPM PALU MBANG	27	25.5	13.05	22.5	88.05	A
18	SKPM POKTALAKA	27	27	12.75	21.25	88	A
19	SKPM POKTALAKA	27	27	13.5	20.5	88	A
20	SKPM PALU	27	27	11.4	22.5	87.9	A
21	SKPM S. BAWAYAH	27	27	12.6	21.25	87.85	A
22	SKPM MEDAN	27	25.4	11.88	22.5	87.78	A
23	SKPM PACANG	27	25.5	13.5	22.5	87.5	A
24	SKPM TETEKUN	27	25.5	13.5	21.25	87.25	A
25	SKPM BALUBALUBAN	27	27	13.5	20	87.5	A
26	SKPM GOSONTALO	27.6	24.6	12.8	22.5	87.3	A
27	SKPM TAJURAH	20.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	SKPM ANDOH	27	25.5	13.5	21.25	87.25	A
29	SKPM SORONG	25.6	28.1	13.05	22.5	87.25	A
30	SKPM KUPANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
31	SKPM KUKUKU PRANJO	27	27	11.85	21.25	87.1	A
32	SKPM MANADO	27	24	13.5	22.5	87	A
33	SKPM G. MARANG	27	24	13.5	22.5	87	A
34	SKPM YOGYAKARTA	27	24	13.5	22.5	87	A
35	BKPM JAKARTA	27	27	12.8	20	86.8	A
36	SKPM KEBANG	27	27	10.85	22.5	86.05	A
37	SKPM TETEKUN	27	27	12.1	20.5	86.6	A
38	SKPM BOKKULU	27	25.5	13.05	21.25	86.8	A
39	SKPM T. BALAI ASOHAN	25.2	27	11.85	22.5	86.55	A
40	SKPM BINA	25.5	25.5	13.05	22.5	86.55	A
41	SKPM S. BAWAYAH	20.1	26.1	13.05	21.25	86.5	A
42	SKPM MURUNG	25.5	27	12.75	21.25	86.5	A
43	SKPM AMPUNG	27	25.2	13.5	20.75	86.45	A
44	SKPM BALAN	27	25.5	12.9	21	86.4	A
45	SKPM JAKARTA II	27	27	11.25	21	86.25	A
46	SKPM MERIK	25.6	25.5	12.75	22.5	86.35	A
47	SKPM MAMAU	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
48	SKPM BALUBALU	20.1	27	11.85	21.25	86.2	A
49	SKPM TAJURAH PRANJO	24.9	27	12.75	21.5	86.15	A
50	SKPM DEHPASAR	27	24	12.8	21	84.8	A
51	SKPM JAYAPURA	20.7	25.7	12	15.5	66.9	B

Dokumen ini telah dimandatkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan زیر dasi Sertifikasi Negara

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target **(286 Nilai)** yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHPK, khususnya untuk 20 Satker dengan dibawah target **(586 Nilai)** diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2026;
5. Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMHPK Tahun 2025 dapat dilihat pada aplikasi Kinerja masing-masing satker.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPMHPK
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diakreditasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN IV/TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis :	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 13 :	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Targ et Th. 2025
	Q1	Q2	8m.I	Q3	Q4	8m.II	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
% Capaian	131,57%	131,57%	131,57%	131,57%	131,57 %	131,57 %	131,57 %	131,57 %	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

8m I = Capaian Q1 + Capaian Q2

8m 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada Indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumkan pada SIRUP :

- A. Nilai Rencana Umum PBJ yang dimumkan pada SIRUP
B. Pagu pengadaan Barang/Jasa

a. Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang dimumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Balai KIPM Jakarta III telah mencapai persentase 100,00%.

b. Capaian Iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase KUP PBJ yang dimumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang dimumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan barang/jasa}} \times 100\%$$

Akar Masalah

-

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Biro umum dan PBJ	Tw.4 Tahun 2025

dan Pengendalian dan Penguasaan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan

[illegible]

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KPM Jakarta II TRIWULAN IV TAHUN 2023

Nama Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Peningkatan Mutu Hasil Keluaran dan Perekaman

Nama IKU 14 : Peningkatan pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KPM Jakarta II (%)

IKU	TAHUN							Capaian 1 th. 2023	Target 1 th. 2023
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Realisasi	-	-	-	-	75,14	75,14	75,14	-	-
% Capaian	-	-	-	-	107,34	107,34	107,34	-	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4.

Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023.

<p>Isu utama dan implikasi</p> <p>Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Peraturan KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN integritas di lingkungan KKP.</p> <p>Cara Pengukuran:</p> <p>Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektori Jenderal terhadap komponen sistem anti korupsi, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan zona integritas (bobot 50%) Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) Peningkatan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) Peningkatan bantuan koruptor (bobot 15%) Polisipasi Masyarakat (LHKAN) (bobot 15%) Pengendalian Kesenjangan (bobot 10%) <p>Score lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditandatangani oleh Inspektori Jenderal.</p>
--

<p>Akar Masalah</p>
<p>Tindakan yang telah dilaksanakan</p>

Rekomendasi rencana aksi	Pemanggung Jawab	Periode
Memperbaiki nilai pembangunan integritas	Kotak Tim Dukungan Manajemen Teknis	TW. 4 tahun 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3516070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513252
LAMARAN [www.kpp.go.id](mailto:info@kpp.go.id) SURTEL bagianreg@kpp.go.id

Nomor : B.175/BPPMHKP.1/OT.710/II/2025 15 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Hasil Penilaian Pembangunan ZI Menuju
WBK/WBBM Tahun 2025

Yth. Kepala UPT Lingkup Badan PPMHKP
Di Tempat

Dalam rangka Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT BPPMHKP dan Surat kami yang sebelumnya telah kami kirim dengan Nomor B. 2406/BPPMHKP.1/OT.730/VI/2025 Tanggal 5 Mei 2025 kepada 5 (lima) UPT yang dilakukan pemantauan 2 Tahunan dan Persiapan Penilaian TPI dan TPN, Surat Nomor B. 3025/BPPMHKP.1/OT.720/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025 kepada 42 (empat puluh dua) UPT tentang Penilaian Mandiri Eselon I terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, serta Surat kami Nomor B.5753/BPPMHKP.1/OT.710/XII/2025 Tanggal 11 Desember 2025 kepada 47 (empat puluh tujuh) UPT tentang Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK UPT BPPMHKP, Tim Penilai Mandiri Eselon I lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan Pemantauan dan Penilaian Pembangunan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 yaitu untuk:
 - a. Mengetahui perkembangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diseluruh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,
 - b. Sebagai tahapan proses keberlanjutan komitmen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan dokumen pemenuhan LKE pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan memastikan bahwa Indikator pembangunan Zona Integritas telah dilengkapi dengan bukti dukung memadai,
 - d. sebagai sumber data Capaian IKU Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT BPPMHKP.

2. Ruang lingkup Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM meliputi :

A. PENGUNGKIT (Pemerintahan dan Reform)

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Tatalembaga
- 3) Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur
- 4) Penguatan Akuntabilitas
- 5) Penguatan Pengawasan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B. HASIL

- 1) Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel
- 2) Pelayanan Publik Yang Prima

3. Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terhadap 47 UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:

- a. 37 UPT yang memiliki target IKU Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, sebanyak 5 UPT dengan Target 75% dan 32 UPT dengan Target 70%;
 - b. Dari 37 UPT yang memiliki target IKU pembangunan Integritas, 35 UPT telah memenuhi nilai target dan 2 UPT belum memenuhi nilai target yang disebabkan pengiriman data melebihi batas waktu yang ditentukan dan proses penilaian telah selesai;
 - c. Terdapat 10 UPT yang tidak memiliki target IKU Pembangunan menuju WBK/WBBM, namun tetap dilaksanakan penilaian sebagai pemantauan komitmen UPT dalam melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang sebelumnya telah dicanangkan, dengan catatan 3 UPT tidak menyampaikan dokumen/link;
4. Hasil penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 sebagai mana terlampir dan rincian LKE serta rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan ke masing-masing Unit Pelaksana Teknis dapat dipergunakan sebagai dasar pemenuhan IKU Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diluapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Plt.Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran I

Nomor : B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Lingkup BPPMHKP

NO.	UNIT KERJA	TARGET NILAI	PENILAIAN MANDIRI SET BPPMHKP	KETERANGAN
1	Balai Besar KPM Makassar	73	73.33	TARGET Tercapai
2	Balai KPM Bontomatene	73	73.33	TARGET Tercapai
3	Balai KPM Bone	73	77.73	TARGET Tercapai
4	Balai KPM Dampas	73	76.43	TARGET Tercapai
5	Balai KPM Mandala	73	73.33	TARGET Tercapai
6	BALAI BESAR KPM JAKARTA I			- Tidak Data / GJ - Tidak Menerima / Only/Manajemen
7	BALAI KPM MEDAN I	70	73.3	TARGET Tercapai
8	BALAI KPM BUKITINGGIR	70	83.33	TARGET Tercapai
9	BALAI KPM JOYOKARTO	70		Tidak Menerima / Only/Manajemen dan Balas / Tidak
10	BALAI KPM JAKARTA II	70	73.33	TARGET Tercapai
11	BALAI KPM SURABAYA I			- Tidak Data / GJ - Tidak Menerima / Only/Manajemen
12	BALAI KPM MATARAM	70	83.33	TARGET Tercapai
13	BALAI KPM BANJARBARA	70	73.33	TARGET Tercapai
14	BALAI KPM LAMPUNG	70		Tidak Menerima / Only/Manajemen dan Balas / Tidak
15	BALAI KPM AMBON	70	83.33	TARGET Tercapai
16	BALAI KPM KOTABUKIT		83.33	Tidak Data / GJ
17	BALAI KPM TANJUNGPINANG	70	73.33	TARGET Tercapai
18	BALAI KPM TAREH	70	73.33	TARGET Tercapai
19	STASIUN KPM KALIMANTAN	70	73.33	TARGET Tercapai
20	STASIUN KPM BANDUNG		83.33	Tidak Data / GJ
21	STASIUN KPM MERANG	70	73.33	TARGET Tercapai
22	STASIUN KPM PONTIANAK	70	73.33	TARGET Tercapai
23	STASIUN KPM GENDAR	70	73.33	TARGET Tercapai
24	STASIUN KPM BATANG	70	73.33	TARGET Tercapai
25	STASIUN KPM PASIR	70	83.33	TARGET Tercapai
26	STASIUN KPM JAWA	70	83.33	TARGET Tercapai
27	STASIUN KPM PULUNGKARAJA	70	73.33	TARGET Tercapai
28	STASIUN KPM KUPANG	70	73.33	TARGET Tercapai
29	STASIUN KPM PANGKAL PINANG	70	83.33	TARGET Tercapai
30	STASIUN KPM TERNATE	70	77.73	TARGET Tercapai
31	STASIUN KPM YOGYAKARTA	70	83.33	TARGET Tercapai
32	STASIUN KPM KOTA	70	83.33	TARGET Tercapai
33	STASIUN KPM SORONG	70	73.33	TARGET Tercapai
34	STASIUN KPM POKONG	70	73.33	TARGET Tercapai
35	STASIUN KPM MEDAN II	70	73.33	TARGET Tercapai
36	STASIUN KPM SORONG	70	73.33	TARGET Tercapai
37	STASIUN KPM SENGKULU	70	73.33	TARGET Tercapai
38	STASIUN KPM CIREBON	70	83.33	TARGET Tercapai
39	STASIUN KPM CUPUK BANGSA		83.33	Tidak Data / GJ
40	STASIUN KPM TANJUNGPINANG		83.33	Tidak Data / GJ
41	STASIUN KPM SING		73.33	Tidak Data / GJ
42	STASIUN KPM TANGAL			- Tidak Data / GJ - Tidak Menerima / Only/Manajemen
43	STASIUN KPM SUDAMARA		73.33	Tidak Data / GJ
44	STASIUN KPM MERAK	70	77.73	TARGET Tercapai
45	STASIUN KPM MENDUNG	70	73.33	TARGET Tercapai
46	BALAI UTARA KPM	70	73.33	TARGET Tercapai

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM Jakarta II
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Nama IKU 16	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)							
TIR	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	8m.I	Q3	Q4	8m.II	Tahunan		
Target	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36		3,36
Realisasi	91,15	96,94	94,04	93,40	88,16	84,77	-	-	-
% Capaian	103,57%	110,15%	106,88	105,13	99,18	120,60	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

Peningkatan penilaian kinerja pelayanan kepuasan masyarakat (SKM) dengan melalui responden survey hasil validasi Balai KIPM Jakarta II pada triwulan IV realisasi dengan nilai 96,15 kategori (A) sangat baik. Dengan jumlah responden 61.

Capaian Iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25

Akar Masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Mohon dapat ditingkatkan kualitas/kemudahan akses sistem layanan. - Menyederhanakan prosedur layanan sertifikasi.
Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	Pusat Manajemen Mutu	Tw. 4 Tahun 2025

Data Dukung SKM Tah.4

